

Gubernur Anwar Hafid Lantik 36 Pejabat Eselon II dan 3.230 PPPK Paruh Waktu

SULTENG RAYA — Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid didampingi Wakil Gubernur Sulteng dr. Reny Lamadjido melantik 36 pejabat eselon II, pejabat fungsional, serta menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepada lebih dari 3.230 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Kegiatan tersebut berlangsung di Halaman Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu, 31 Desember 2025.

Pelantikan ini dilaksanakan dalam suasana khidmat dan penuh haru, menandai dimulainya tanggung jawab baru bagi para pejabat dan ASN yang menerima amanah.

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa jabatan yang diberikan bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah besar dari daerah dan negara yang harus dijalankan dengan

penuh tanggung jawab.

“Kita baru saja menerima amanah dari daerah dan negara. Mudah-mudahan amanah ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, karena ini adalah amanah besar,” ujar Gubernur.

Gubernur menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik maupun yang tetap pada jabatannya, serta kepada seluruh PPPK Paruh Waktu yang hari itu menerima SK

Baca **GOVERNUR** Hal. 7



PELANTIKAN pejabat eselon II oleh Gubernur Anwar Hafid, Rabu (31/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Gubernur dan Kapolda Sulteng Cek Pengamanan Malam Tahun Baru 2026



GOVERNUR SULTENG, Anwar Hafid bersama Kapolda Sulteng, Irjen Pol Dr. Endi Sutendi, beserta rombongan Forkopimda, saat melakukan pengecekan pengamanan pergantian malam tahun baru 2026 oleh personel gabungan di Pospam Jalan Pattimura, Kota Palu, Rabu (31/12/2025) malam. FOTO: DAYAT

SULTENG RAYA - Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid bersama Kapolda Sulteng, Irjen Pol Dr. Endi Sutendi, beserta rombongan Forkopimda, melakukan pengecekan pengamanan pergantian malam tahun baru 2026 di sejumlah pos pengamanan (Pospam) dan pos pelayanan (Posyan) di Kota Palu, Rabu (31/12/2025) malam.

Pantauan Sulteng Raya, Gubernur dan Kapolda beserta sejumlah Pejabat

Utama (PJU) Polda setempat menaiki bus yang sama untuk meninjau dua Pospam masing-masing yang pertama dikunjungi adalah Pospam yang berada lokasi traffic light antara Jalan Basuki Rahmat dan Jalan Towua dan kedua Pospam yang berlokasi di Jalan Pattimura dan selanjutnya mengecek Posyan di Jalan Hasanudin samping kantor BNI Cabang Palu.

Baca **PENGAMANAN** Hal. 7

Sepanjang 2025 Polres Parigi Moutong Ungkap 67 Kasus Narkoba, Amankan 506,73 Gram Sabu



KEGIATAN press rilis pengungkapan kasus tahun 2025 di Mako Polres Parigi Moutong, Rabu (31/12/2025). FOTO: ASLAN LAEHO

SULTENG RAYA - Komitmen Polres Parigi Moutong dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba kembali ditegaskan.

Dalam press rilis pengungkapan kasus narkoba sepanjang tahun 2025 di Mako Polres Parigi Moutong, Rabu (31/12/2025) terungkap bahwa sepanjang tahun 2025 jajaran Polres Parigi Moutong

bersama polsek jajaran berhasil mengungkap 67 kasus narkoba.

Kapolres Parigi Moutong, AKBP Dr. Hendrawan A.N., S.I.K, M.H mengatakan, kegiatan press rilis tersebut menjadi bagian dari transparansi kinerja kepolisian kepada publik

Baca **POLRES** Hal. 7

DI BALIK APBD 2026 PARIGI MOUTONG

Jejak Tarik Ulur Pokir DPRD dari Rp10 Miliar hingga Isu Rp25 Miliar

SULTENG RAYA - Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2026 menyisakan tanda tanya.

Dibalik ketukan palu paripurna, muncul dinamika tarik ulur anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD yang disebut-sebut

mengalami lonjakan signifikan, dari angka awal Rp10 miliar hingga mencuat isu mencapai Rp25 miliar.

Informasi tersebut beredar seiring tertundanya proses asistensi dan evaluasi Raperda APBD 2026, yang seharusnya segera bergulir ke tingkat provinsi.

Baca **JEJAK** Hal. 7



SALAH SATU kegiatan rapat paripurna di DPRD Parigi Moutong. FOTO: ASLAN LAEHO

Menbud Dorong Situs Megalitik Watunonju Jadi Museum Terbuka

SULTENG RAYA - Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mendorong terbentuknya museum terbuka di situs megalitik Watunonju, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng).

“Memang seharusnya ada satu museum yang representatif yang menggambarkan kekayaan budaya Sulawesi Tengah walaupun museum tidak harus dibatasi tembok,” kata Fadli Zon saat ditemui awak media di Kabupaten Sigi, Selasa.

Ia mengemukakan museum itu bisa berbentuk open air museum atau Museum Terbuka.

“Tentunya situs megalitik di Watunonju ini bisa menjadi museum terbuka termasuk situs Pokekea dan Behoa Poso, hanya memang perlu adanya perbaikan tata kelola informasi yang lebih



MENTERI KEBUDAYAAN Fadli Zon didampingi Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae (kanan) saat berkunjung di situs megalitik Watunonju, Selasa (30/12/2025). FOTO: ANTARA/MOH SALAM

informatif bagi masyarakat,” ucapnya.

Ia menuturkan pihaknya sudah meresmikan storage, laboratorium, dan pusat informasi kawasan megalitik Lore Lindu di Desa Watunonju, Kabupaten Sigi.

“Hari ini kita meresmikan laboratorium dan pusat informasi kawasan megalitik Watunonju di Kabupaten Sigi, harapannya ke depan ini bisa menjadi wisata budaya, wisata sejarah, dan wisata religi yang bisa menumbuhkan ekonomi budaya bagi masyarakat sekitar khususnya Sulawesi Tengah,” sebutnya.

Fadli Zon menyebutkan jumlah situs megalitik di Watunonju sebanyak 15 lumpang.

Baca **MENBUD** Hal. 7

YAYASAN KOMIU

Temukan Jalur Transit Burung Migrasi di Teluk Palu



BURUNG gajah penggal (Numenius phaeopus) yang terlintas di Muara Sungai Tawaili, Kota Palu. FOTO: ANTARA/YAYASAN KOMIU

SULTENG RAYA - Yayasan Kompas Peduli Hutan (Komiu) menemukan jalur transit burung migrasi di Teluk Palu, sebagai zona larangan penambangan.

Direktur Yayasan Komiu, Gifvents menjelaskan keberadaan burung migrasi dan burung pantai itu menjadi penegasan bahwa Teluk Palu tidak hanya berperan sebagai habitat lokal, tetapi juga sebagai habitat singgah, wilayah jelajah harian, serta koridor migrasi penting

dalam jaringan pergerakan burung pada skala regional.

“Zona itu kami dapatkan di muara Sungai Taipa dan muara Sungai Tawaili di Teluk Palu sebagai jalur transit burung migrasi,” katanya di Palu, Rabu.

Jenis burung migrasi yang ditemukan di Teluk Palu yakni kuntul karang (Egretta sacra), kuntul kecil (Egretta garzetta), dara-laut kecil (Sternula albifrons), cerek

Baca **TEMUKAN** Hal. 7

2025, Terdapat 10 Tindak Pidana Mendominasi di Polres Sigi

SULTENG RAYA - Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Sigi, AKBP Kari Amsah Ritonga menyampaikan sepanjang 2025, Polres Sigi dan Polsek jajaran menangani 508 kasus kejahatan konvensional dengan penyelesaian 433 kasus atau 85,23 persen. Capaian tersebut meningkat dibandingkan tahun 2024 yang mencatat 406 kasus dengan penyelesaian 304 kasus atau 74,87 persen.

“Peningkatan ini merupakan hasil penguatan fungsi penyelidikan dan penyidikan, optimalisasi peran Polsek jajaran, serta sinergi lintas fungsi. Setiap laporan masyarakat kami tangani secara profesional dengan menjunjung keadilan dan kepastian hukum,” ujar Kari Amsah.

Kapolres menambahkan, di tahun yang sama juga terdapat sepuluh jenis tindak pidana yang mendominasi, antara lain penganiayaan biasa (119 kasus), pencurian biasa (64), penggelapan (48), curanmor (44), curat (41), KDRT (23), penipuan (20), pengeroyokan (19), pengancaman (18), dan pencabulan (18).

Selain itu, Polres Sigi juga berhasil mengungkap sejumlah kasus menonjol, yakni pembunuhan (4 kasus), penambangan emas tanpa izin (PETI) sebanyak 3 kasus, serta

tindak pidana korupsi (1 kasus).

“Setiap perkara yang menjadi perhatian publik kami tangani secara serius, transparan, dan tuntas. Tidak ada ruang bagi pelaku kejahatan di wilayah hukum Polres Sigi,” tegas Kapolres.

Menurutnya, capaian tahun 2025 menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik dan jadikan Polri sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan.

“Polri bukan hanya penegak hukum, tapi juga pemelihara keamanan dan ketertiban sosial, pelindung hak warga, pemberi pelayanan, serta pembangun peradaban melalui penyelesaian konflik, pencegahan kejahatan, perlindungan korban, dan edukasi untuk memastikan masyarakat dapat hidup aman, nyaman, dan produktif,” jelasnya.

Hal ini, kata kapolres sejalan dengan amanat konstitusi untuk melindungi, mengayomi, melayani, dan menegakkan hukum demi mewujudkan keteraturan sosial.

Saat acara press rilis, kapolres didampingi Wakapolres Sigi, para Kabag, serta para Kasat Opsnal Polres Sigi dan Kasihumas Polres Sigi, bertempat di Aula Sarja Arya Racana, Selasa (30/12/2025). **AMR**



KAPOLRES Sigi, AKBP Kari Amsah Ritonga, saat memimpin press rilis akhir tahun di Mapolres Sigi, Selasa (30/12/2025). **FOTO: HUMAS POLRES SIGI**

Tim SAR Cari Pria Lansia Hilang di Kebun

SULTENG RAYA - Seorang pria lanjut usia (lansia) bernama Sail (90) dikabarkan hilang di area perkebunan Desa Pisou, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu menerima laporan mengenai orang hilang tersebut dari pihak keluarga bernama Irsan, pada Kamis (1/1/2026).

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu, Muh Rizal mengatakan, kronologi kejadian, pada Selasa (30/12/2025) sekira pukul 06.30 Wita, korban berangkat

ke perkebunan kakao bersama anaknya dengan jarak dari perkampungan 4 Km.

Kemudian setelah sampai di kebun tersebut, keduanya terpisah, karena anaknya akan memetik buah kakao, lalu sekira pukul 11.00 Wita, setelah di cek di pondok, korban sudah tidak ada.

“Dari informasi, korban memiliki riwayat penyakit pikun. Upaya pencarian dari pihak keluarga dan masyarakat sampai saat ini masih nihil,” jelasnya.

Lokasi kejadian terletak pada koordinat LKP 0°49’40.07”S - 122°38’11.80”E

Heading 319° arah utara dari Pos SAR Luwuk jarak lurus 25 Km, waktu tempuh 2 jam 5 menit.

“Tim Rescue dari Pos SAR Luwuk berangkatkan ke L1-lokasi kejadian menggunakan Rescue Car,” jelasnya.

Unsur SAR terlibat terdiri dari Tim Rescue Pos Sar Luwuk, Bhabinsa, Bhabinkamtibnas, pemerintah desa dan warga setempat.

Sementara, alat yang digunakan, Rescue Car, Peralatan navigasi, Palsar jungle, Peralatan Komunikasi, Palsar medis dan Palsar evakuasi. **AMR**



SEJUMLAH personel Tim SAR gabungan, saat melakukan pencarian terhadap pria lansia yang hilang di area kebun Desa Pisou, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Kamis (1/1/2026). **FOTO: DOK TIM SAR GABUNGAN**



KAPOLDA Sulteng Irjen Pol, Endi Sutendi, saat meninjau sejumlah barang bukti berupa senpi rakitan dan amunisi, yang diamankan petugas Operasi Madago Raya sepanjang 2025, belum lama ini. **FOTO: DOK SATGAS MADAGO RAYA**

OPERASI MADAGO RAYA

Sepanjang 2025, Amankan 8 Senpi Rakitan dan 313 Amunisi

SULTENG RAYA - Sepanjang 2025 pelaksanaan Operasi Madago Raya, petugas telah mengamankan sebanyak 8 pucuk senjata api (Senpi) rakitan dan 313 butir amunisi berbagai kaliber, 6 magazen, 1 popor, 2 laras senjata api rakitan, serta 1 pucuk air soft gun, yang berpotensi membahayakan masyarakat.

Kapolda Sulteng Irjen Pol Dr. Endi Sutendi, Selasa (30/12/2025) mengatakan, selama 2025 Polda Sulteng menggelar berbagai operasi kewilayahan sebagai langkah strategis dalam menjaga dan mewujudkan harkamtibmas. Operasi tersebut difokuskan pada pencegahan gangguan keamanan serta penegakan hukum secara berkelanjutan.

Salah satu operasi yang menjadi fokus utama adalah Operasi Mada-

go Raya yang dilaksanakan mulai tahap I hingga tahap IV sepanjang tahun 2025. Operasi ini ditujukan untuk menjaga stabilitas keamanan pasca penindakan beberapa waktu lalu terhadap jaringan terorisme di wilayah Poso dan daerah sekitarnya.

“Upaya ini tidak hanya berfokus pada pencegahan, tetapi juga pemeliharaan kamtibmas agar masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman,” kata Endi.

Kapolda Sulteng juga menegaskan dari temuan sejumlah senpi dan amunisi itu menjadi indikator masih adanya sisa-sisa ancaman terorisme yang harus diantisipasi secara serius. Oleh sebab itu, kehadiran Satgas Madago Raya dinilai sangat penting untuk mempersempit ruang gerak

pihak-pihak yang dapat mengganggu stabilitas keamanan.

Kapolda mengimbau seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah untuk terus berperan aktif menjaga situasi kondusif. Ia juga menekankan bahwa keamanan merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan kedamaian yang berkelanjutan di Sulteng.

“Keamanan dan ketertiban tidak bisa dijaga oleh kepolisian semata. Kami membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Dengan komunikasi yang baik, kepedulian lingkungan, serta kepercayaan yang terus terbangun, situasi Sulawesi Tengah tetap aman, damai, dan kondusif,” pungkasnya. **AMR**



SEJUMLAH personel gabungan, saat melaksanakan tugas pengamanan pada malam pergantian tahun di Kabupaten Poso, Rabu (31/12/2025). **FOTO: HUMAS POLRES POSO**

Malam Pergantian Tahun di Poso Berlangsung Kondusif

SULTENG RAYA - Malam pergantian tahun baru di wilayah Kabupaten Poso berlangsung aman dan kondusif. Kondisi ini tidak terlepas dari kesiapsiagaan serta pengamanan optimal yang dilaksanakan Polres Poso, guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Rabu (31/12/2025) malam.

Dalam rangka memastikan situasi tetap terkendali, Polres Poso mensiagakan personel di sejumlah titik tertentu yang menjadi pusat berkumpulnya masyarakat dalam merayakan malam pergantian tahun. Pengamanan difokuskan pada lokasi-lokasi keramaian seperti alun-alun kota poso, kawasan jembatan penghubung Kabose dan Boneka, kawasan pertokoan, persimpangan jalur, ruas jalan utama, serta titik-titik rawan yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas.

Selain penjagaan statis, personel juga melaksanakan patroli rutin dan patroli dialogis, baik secara terbuka maupun tertutup. Petugas turut memberikan imbauan kamtibmas ke-

pada masyarakat agar tetap menjaga ketertiban, menghindari konsumsi minuman keras, serta tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan bersama.

Kasi Humas Polres Poso, Iptu Rianto Hilian, menjelaskan seluruh rangkaian pengamanan berjalan sesuai dengan rencana dan situasi di lapangan terpantau aman.

“Polres Poso telah menyiapkan personel di titik-titik strategis yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, termasuk tempat keramaian, pertokoan, dan persimpangan jalan. Hingga pergantian tahun, situasi kamtibmas terpantau aman dan kondusif,” ujarnya.

Ia menambahkan, Kapolres Poso AKBP Alowisius Londer menyatakan mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh personel yang telah melaksanakan tugas pengamanan dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab.

“Kapolres mengucapkan terima kasih kepada seluruh personel Polres Poso dan unsur pengamanan lainnya

yang telah bekerja maksimal sehingga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif selama malam pergantian tahun,” ujar Kasi Humas.

Selain kepada personel, Kapolres Poso juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Poso atas peran serta dan kepatuhan dalam menjaga ketertiban umum.

“Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mematuhi imbauan kepolisian dan turut menjaga keamanan lingkungan masing-masing, sehingga pergantian tahun dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif,” tambahnya.

Berkat sinergi antara kepolisian, TNI, pemerintah daerah, serta dukungan masyarakat, situasi kamtibmas di wilayah Poso terpantau aman hingga memasuki tahun yang baru.

Polres Poso terus mengajak seluruh elemen masyarakat kedepannya untuk terus bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban demi terciptanya Kabupaten Poso yang aman, damai, dan harmonis. **AMR**

Kodam XXIII/PW Peringati HUT Kowad ke-64



PANGDAM XXIII/Palaka Wira, Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar, saat memberikan potongan nasi tumpeng kepada perwakilan prajurit Kowad dalam peringatan HUT Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad) ke-64 Tahun 2025 di Makodam XXIII/Palaka Wira, Jalan Jenderal Sudirman No. 25, Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: PENDAM XXIII/PW

Polres Parmout Ikuti Pengajian Wali Santri di Ponpes Darunnajah Toboli



SUASANA Silaturahmi Wali Santri dan Pengajian yang digelar di Ponpes Darunnajah, Desa Toboli, Kecamatan Parigi Utara, Jumat (26/12/2025) siang. FOTO: DOK POLRES PARMOUT

SULTENG RAYA - Upaya memperkuat silaturahmi serta menanamkan nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat terus dilakukan melalui berbagai kegiatan positif. Salah satunya terlihat dalam kegiatan Silaturahmi Wali Santri dan Pengajian yang digelar Pondok Pesantren (Ponpes) Darunnajah, Desa Toboli, Kecamatan Parigi Utara, Jumat (26/12/2025) siang.

Kegiatan yang berlangsung di Masjid Ponpes Darunnajah tersebut dihadiri oleh Ipda Erwin L., yang mewakili Kapolres Parigi Moutong (Parmout). Kehadiran Polri dalam kegiatan keagamaan ini menjadi wujud sinergi dan kedekatan dengan tokoh agama, lembaga pendidikan Islam, serta masyarakat.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Pimpinan Ponpes Alfatah Temboro Karas, Magetan, Jawa Timur, Ustadz KH. Imdhadun Nasikhin, S.Ag., personel Satbinmas Polres Parigi Moutong yang juga Da'i Polri, perwakilan Camat Parigi Utara Abdullah, S.E., Ketua MUI Kecamatan Parigi Utara, para imam masjid, tokoh masyarakat, wali santri, serta para santri Ponpes Darunnajah Toboli.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan, dilanjutkan laporan pimpinan Ponpes Darunnajah Toboli Ust. Muh. Zainuddin, serta sambutan Kapolres Parigi

Moutong yang disampaikan oleh Ipda Erwin L. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya menjaga persatuan, meningkatkan akhlak generasi muda, serta membangun lingkungan yang aman, religius dan kondusif melalui peran bersama antara ulama, orang tua dan aparat keamanan.

Sambutan juga disampaikan oleh perwakilan Camat Parigi Utara, sebelum acara dilanjutkan dengan ceramah agama yang disampaikan oleh KH. Imdhadun Nasikhin, S.Ag. Dalam tausiah yang penuh makna, ia mengajak para wali santri dan santri untuk terus mena-namkan nilai keimanan, kedisiplinan dan keteladanan sebagai bekal membangun masa depan yang berakhlak mulia.

Kegiatan silaturahmi dan pengajian ini berlangsung dengan khidmat, aman dan lancar hingga selesai. Selain menjadi sarana mempererat hubungan antara pengelola pesantren dan wali santri, kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara Polri, tokoh agama dan masyarakat dalam menciptakan situasi kamtibmas yang harmonis.

Polres Parigi Moutong menegaskan komitmennya untuk terus hadir dan mendukung kegiatan keagamaan serta pendidikan sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang religius, damai dan berkarakter.*/YAT

SULTENG RAYA - Kodam XXIII/Palaka Wira (PW) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad) ke-64 Tahun 2025 dengan penuh semangat kebersamaan dan kekeluargaan.

Kegiatan peringatan tersebut, dilaksanakan di Makodam XXIII/Palaka Wira, Jalan Jenderal Sudirman No. 25, Kota Palu, sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi dan pengabdian prajurit Kowad kepada bangsa dan negara, Selasa (23/12/2025). Peringatan HUT Kowad ke-64 diawali dengan senam

bersama yang diikuti oleh prajurit Kowad dan jajaran Kodam XXIII/Palaka Wira. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur atas 64 tahun perjalanan pengabdian Korps Wanita Angkatan Darat, yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh

kebersamaan.

Dalam kesempatan tersebut, Pangdam XXIII/Palaka Wira, Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar, membacakan sambutan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad). Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa memasuki usia ke-64 tahun, Kowad dituntut untuk semakin adaptif, tangguh dan prima dalam menghadapi tantangan tugas ke depan yang semakin kompleks dan dinamis.

Perubahan lingkungan strategis, perkembangan teknologi militer, serta tuntutan profesionalisme mendorong seluruh prajurit, termasuk prajurit wanita, untuk terus meningkatkan kapasitas dan kesiapan diri.

Kasad menekankan agar seluruh anggota Kowad senantiasa mengembangkan kemampuan, serta aktif melahirkan inovasi dalam merespons perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi terkini. Hal ini sejalan dengan tema peringatan HUT ke-64 Kowad tahun 2025, "Kowad Prima, Siap Mendukung TNI Menuju Indonesia Maju," yang menegaskan pentingnya kesiapan intelektual, kompetensi teknis, serta integritas, etika, dan karakter jati diri Kowad dalam setiap medan pengabdian.

Lebih lanjut disampaikan bahwa di balik ketangguhan sebagai prajurit, Kowad tidak boleh melupakan peran penting dan mulia sebagai perempuan, baik sebagai anak, istri, maupun ibu. Oleh karena itu, Kowad dituntut mampu menjaga keseimbangan antara profesionalitas dalam tugas dan keharmonisan dalam menjalankan peran lainnya.

Dengan semangat bela negara yang tertanam kuat, Kasad meyakini para Sri-kandi TNI AD akan terus bertransformasi menjadi kekuatan yang berpengaruh dan relevan dalam setiap penugasan, baik di dalam negeri maupun luar negeri.*/YAT

PATROLI BLUE LIGHT POLSEK TORUE

Jaga Kamtibmas, Warga Aman Hingga Tengah Malam



JAJARAN Polsek Torue saat melaksanakan patroli malam atau Blue Light Patrol di wilayah hukumnya, Kamis (25/12/2025) malam. FOTO: Dok Polsek Torue

pesan-pesan kamtibmas kepada masyarakat. Imbauan disampaikan secara humanis, mengajak warga untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan masing-masing. Kepada kelompok pemuda yang masih berkumpul

hingga larut malam, petugas memberikan imbauan agar menghindari perkelahian, konsumsi minuman keras, penyalahgunaan narkoba, serta praktik judi online.

Hasil dari kegiatan patroli tersebut pun dirasakan

Polsek Tomini Bongkar Peredaran Sabu di Mepanga



PELAKU peredaran sabu saat diamankan beserta barang bukti sabu. FOTO: DOK POLSEK TOMINI

SULTENG RAYA - Komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba kembali dibuktikan. Jajaran Polsek Tomini berhasil mengungkap tindak pidana peredaran narkoba jenis sabu di Desa Kota Raya Barat, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, Kamis (24/12/2025) sore.

Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang resah dengan maraknya dugaan transaksi sabu di wilayah tersebut. Menindaklanjuti laporan itu, Kapolsek Tomini Iptu Sumarlin bersama personel piket melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengamankan dua terduga pelaku, masing-masing berinisial NO (35) dan MJ (29) sekira pukul 15.15 Wita.

Dari hasil pengeledahan badan serta lokasi yang berkaitan dengan aktivitas para terduga, petugas menemukan barang bukti narkoba dalam jumlah signifikan. Polisi mengamankan puluhan paket sabu dengan berbagai ukuran, mulai dari paket kecil, sedang, hingga satu paket besar, beserta perlengkapan pendukung peredaran seperti timbangan digital, telepon genggam, tas, serta uang tunai jutaan rupiah yang diduga hasil

transaksi narkoba.

Dalam pemeriksaan awal, kedua terduga mengakui bahwa narkoba tersebut merupakan milik mereka dan rencananya akan diedarkan di wilayah Kecamatan Mepanga. Dari pengakuan masing-masing, polisi juga mendapatkan informasi awal terkait jalur perolehan barang haram tersebut, yang kini tengah didalami lebih lanjut untuk mengungkap jaringan di atasnya.

Selain barang bukti yang diamankan dari NO (35), petugas juga menemukan sejumlah paket kecil sabu di saku celana salah satu terduga lainnya beserta satu unit telepon genggam. Seluruh barang bukti kemudian disita dan diamankan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Kapolsek Tomini, Iptu Sumarlin menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan hasil sinergi antara masyarakat dan kepolisian. Ia menyampaikan apresiasi atas peran aktif warga yang tidak ragu memberikan informasi demi menjaga lingkungan dari ancaman narkoba.

"Kami tidak akan memberi ruang bagi peredaran narkoba di wilayah hukum Polsek Tomini. Kasus ini akan terus dikembangkan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas," tegasnya.

Atas perbuatannya, para terduga pelaku dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman berat. Saat ini, penyidik tengah melengkapi administrasi penyidikan, melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti, tes urine, serta pendalaman terhadap saksi-saksi dan jaringan asal narkoba.

Polsek Tomini kembali mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif dalam memerangi narkoba dengan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan. Peredaran narkoba bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman serius bagi masa depan generasi dan keamanan sosial di Parigi Moutong.*/YAT



Kementerian PU Bangun 24 Titik Sumur Bor di Aceh Tamiang



WARGA dan pengungsi mengambil air bersih yang didistribusikan Pemerintah dan lembaga sipil di Desa Dalam, Aceh Tamiang, Aceh, Ahad (28/12/2025). FOTO: ANT

SULTENG RAYA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memulai pekerjaan pengeboran air baku di 24 titik di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Pengeboran dilakukan untuk membangun layanan air bersih darurat pascabencana banjir bandang dan mendukung pemulihan kesehatan masyarakat.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan, ketersediaan air bersih

jadi kebutuhan mendesak setelah penanganan infrastruktur dasar seperti jalan

dan jembatan mulai berjalan. "Kalau sudah tidak ada air, penyakit pasti datang. Setelah urusan jalan dan jembatan mulai membaik, fokus kita berikutnya adalah soal air. Air bersih harus segera tersedia untuk seluruh masyarakat," ujar Dody dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (29/12/2025). Dody menyebut pengeboran dilakukan melalui pem-

angunan sumur dalam dan sumur dangkal secara bertahap untuk melengkapi fasilitas mandi, cuci, dan kakus. "Per Ahad (28/12/2025), pekerjaan pembangunan sumur bor air baku telah berjalan di sejumlah lokasi," ucap Dody. Ia mencatat tiga lokasi telah memasuki tahap pengeboran, yakni Masjid Simpang Lhee Kecamatan Banyak Payed, Masjid Al

Ikhlas Kecamatan Banda Mulia, dan Kantor Kecamatan Kuala Simpang. Empat lokasi lain masih dalam tahap persiapan pekerjaan, masing-masing di Desa Matang Taupah Kecamatan Bendahara, Gempong Manahini Kecamatan Karang Batu, Desa Bandar Kalifah Kecamatan Tamiang Hulu, serta Pondok Pesantren Darul Mukhlisin Kecamatan Karang Baru.

"Kegiatan survei geolistrik juga terus dilakukan untuk memastikan potensi air tanah yang optimal dengan tim geolistrik Balai Air Tanah (BAT).

Pesantren Darul Mukhlisin di Kecamatan Karang Baru telah tersedia alat bor di lokasi dan siap memasuki tahap pelaksanaan," sambung Dody. Kementerian PU merencanakan pembangunan 24 titik sumur bor air baku yang tersebar di 12 lokasi dengan dukungan lima unit alat bor dan satu mobil bor Koken. Mobil bor tersebut tengah dimobilisasi dari Banda Aceh menuju Aceh Tamiang.

Pekerjaan ini merupakan bagian dari program penyediaan air bersih terpadu yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU. Sebaran lokasi mencakup Kecamatan Karang Baru, Kuala Simpang, Bendahara, dan Banyak Payed masing-masing empat lokasi, serta Kecamatan Rantau, Sekerak, dan Kejuruan Muda masing-masing dua titik.

Selain itu, masing-masing dua lokasi juga direncanakan di Kecamatan Seruway, Bandar Pusaka, Tenggulun, Banda Mulia, dan Tamiang Hulu. Dody menyebut pengerahan sarana pendukung air bersih dan sanitasi terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.

Saat ini Kementerian PU telah mengoperasikan empat unit instalasi pengolahan air (IPA) mobile, 20 mobil tangki air, 12 unit biority, 63 hidran umum, 26 toilet portabel, tujuh toilet darurat, 39 toren air, serta tiga unit mobil vakum tinja di wilayah Aceh. Pemerintah juga memobilisasi tambahan sarana berupa delapan unit IPA mobile, dua mobil tangki air, tujuh hidran umum, 21 toilet darurat, empat toren air, dan delapan unit sarana pembersihan lumpur kawasan.

"Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat penyediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi di wilayah terdampak bencana, khususnya di Aceh Tamiang," kata Dody.rpp

Danantara Kerjakan Huntara 24 Jam untuk Pengungsi Aceh Tamiang



PEKERJA membangun hunian sementara (huntara) untuk korban bencana banjir bandang di Karang Baru, Aceh Tamiang, Aceh, Ahad (28/12/2025). FOTO: ANT

Wadubes dr Irene Komitmen Perkuat Kemitraan Strategis RI-China

SULTENG RAYA - Hubungan bilateral Republika Indonesia (RI) dan China diarahkan pada penguatan kemitraan strategis yang saling menghormati, setara, dan saling menguntungkan. Seiring dinamika geopolitik dan ekonomi kawasan, diplomasi yang berlandaskan kepercayaan politik dan kerja sama konkret menjadi kunci.

Wakil Duta Besar (Wadubes) RI untuk China, dr Irene menjelaskan, terdapat tiga elemen utama yang menjadi fokus visi dan misi dalam menjalankan amanah yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepadanya. Pertama, mendukung terbangunnya kepercayaan politik tingkat tinggi serta dialog strategis antara kedua negara.

Hal itu didasarkan pada saling menghormati, kesetaraan, dan prinsip non-intervensi. "Dalam bahasa Mandarin, kita sering mengenal istilah (hùli gòngyǐng), yang berarti 'saling menguntungkan dan menang bersama'," ujar Irene dalam siaran pers di Jakarta, Senin (29/12/2025).

"Semangat inilah yang ingin saya bawa dalam berkontribusi, memastikan bahwa kerja sama kita berlangsung secara adil, seimbang, dan berkelanjutan," kata



WAKIL Duta Besar (Wadubes) RI untuk China, dr. Irene. FOTO: REP

Irene melanjutkan.

Elemen kedua adalah mendorong kerja sama konkret yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara. Kerja sama tersebut mencakup bidang perdagangan dan investasi, pembangunan hijau, inovasi

digital, kesehatan, pendidikan, serta pertukaran antar-masyarakat.

Dia menyebut, RI dan China memiliki peran strategis sebagai sesama negara Global South dalam mendorong stabilitas kawasan dan pembangunan global.

Dengan kerja sama yang bijaksana, kata Irene, kedua negara dapat berkontribusi pada terciptanya stabilitas regional dan pembangunan global yang inklusif.

"Menuju apa yang sering disebut sebagai (míngyǔn yǐ gòng), atau masa depan

bersama," ucap Irene yang memang fasih berbahasa Mandarin dan Inggris.

Elemen ketiga yang menjadi perhatian utama Irene adalah pelayanan dan perlindungan terhadap komunitas RI dan China. Dia menyatakan, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beijing harus tetap menjadi rumah yang hangat dan terbuka bagi seluruh warga Indonesia, termasuk pelaku usaha, pekerja, mahasiswa, peneliti, dan keluarga.

"Kami akan terus berupaya melindungi hak-hak warga negara Indonesia, mendukung aktivitas mereka, serta mengapresiasi setiap capaian yang diraih. Keberhasilan warga Indonesia di Tiongkok juga merupakan keberhasilan bangsa Indonesia," tutur Irene.

Dia juga menyoroti kesamaan nilai kultural antara RI dan China yang sama-sama memandang keberagaman sebagai sumber kekuatan. Irene mengutip ungkapan Tiongkok (hé ér bù tóng), yang berarti harmoni tanpa keseragaman, serta semboyan nasional Indonesia Bhinneka Tunggal Ika.

"Kedua nilai tersebut mengajarkan bahwa perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama, melainkan menjadi modal untuk membangun kemitraan yang saling menghormati dan berorientasi ke masa depan," ucap Irene.

Presiden RI Prabowo Subianto melantik Irene menjadi wadubes RI untuk China di Istana Negara, Jakarta Pusat pada 8 Oktober 2025. Sosok dr. Irene membawa pesan inspiratif, khususnya bagi perempuan dan generasi muda dalam dunia diplomasi.rpp

SULTENG RAYA - Danantara terus mempercepat proses pembangunan ratusan hunian sementara (huntara) di Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, pascabencana banjir bandang dan tanah longsor.

"Untuk para korban dibuatkan oleh pemerintah huntara, bukan sebagai tugas karena imbauan, melainkan kewajiban, sebagaimana disampaikan COO Danantara, Dony Oskaria. Ini kewajiban kita," kata Tenaga Ahli Danantara Khairul Jasmi dalam keterangan di Jakarta, Ahad (28/12/2025).

Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan bertolak ke Aceh Tamiang. Salah satu agenda kunjungan tersebut adalah mengecek perkembangan pembangunan huntara. "Presiden Prabowo akan melihat bangunan itu pada 1 Januari 2026. Tentu

saja yang utama bertemu para korban banjir," kata Khairul Jasmi.

Proyek pembangunan huntara tersebut merupakan hasil kolaborasi tujuh BUMN Karya yang dikoordinasikan oleh PT Hutama Karya di bawah naungan Danantara. Untuk mempercepat pengerjaan huntara, para pekerja bekerja selama 24 jam dengan sistem sif.

"Kami bekerja 24 jam dengan sistem sif. Selain mendatangkan teknisi dari berbagai daerah, kami juga merekrut 100 tenaga kerja lokal untuk membangun sekitar 120 unit huntara lengkap," ujar Rony selaku Kepala Divisi Infrastruktur 2 Adhi Karya.

Setiap unit huntara terdiri dari dua kamar, satu ruang tamu, satu dapur, serta dilengkapi instalasi listrik dan air. Saat ini, jumlah pengungsi di Aceh Tamiang tercatat sekitar 150 ribu orang.

"Untuk merekalah huntara dibangun," tambah Khairul Jasmi.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Sabtu (27/12/2025), di Aceh tercatat 511 orang meninggal dunia, 31 orang hilang, dan 429.557 pengungsi akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor.rpp

Biro Perjalanan Umum
CV. MITRATOUNA TRAVEL/BIS
PALU-AMPANA

AGEN PERWAKILAN :

PALU	: Jl. Tombolotutu No.50-52
Telp	: (0451) 424347 - 4704707 - 427139
AMPANA	: Jl. Tanjumbulu Bawah No. 9 (Dekat Tugu Ampana)
Telp	: 081252984112, 081252984116 081243799363, 082122150777

BIRO PERJALANAN UMUM
PRIMA JAYA TRAVEL

PALU - POSO - TENTENA
BUNGKU - KENDARI

PALU Jl. Hangtua No. 40 Telp.: 082396625339	BUNGKU (MOROWALI) Jl. Trans Sulawesi (Depan RSUD Morowali) Telp.: 085394579024	KENDARI Terminal Puwatu Telp.: 082342677110
--	--	--

LORENNIA
TRAVEL AGENT & EXPEDITION

Untuk yang berkeinginan rental MOBIL LORENNIA akan mendapatkan FREE MINERAL WATER & SNACK
7x Koberangkatan
Pala-Tutu gratis 1 tiket

Toko Sempurna Baru
Jl. Syarif Mansur No.111
Taliabu
Telp/WA: 0812 3333 2318
Cabang Palu:
Jl. Juanda No. 76
Telp: 0813 4124 2003
WA: 0862 3256 2003

Kepuasan & Kenyamanan Anda Prioritas Utama Kami

Pemerintah Fokus Pemulihan Aceh Pascabanjir, Sekaligus Lindungi Masyarakat dari Narasi Separatis di Medsos

PEMULIHAN Aceh pascabanjir dan tanah longsor merupakan agenda prioritas pemerintah yang menuntut kehadiran negara secara nyata dan berkelanjutan. Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di provinsi tersebut tidak hanya merusak permukiman warga, tetapi juga memutus konektivitas yang menjadi urat nadi aktivitas sosial dan ekonomi.

OLEH : RAKA PRASETYA

DALAM situasi seperti ini, negara dituntut bergerak cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat terdampak. Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Aceh menunjukkan komitmen tersebut dengan memfokuskan langkah pada pemulihan infrastruktur dan perlindungan sosial. Upaya ini sekaligus menjadi penegasan bahwa penanganan bencana tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga persatuan nasional.

Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Prita Ismayani Sriwidyarti, menilai ancaman judi daring terus menguat seiring derasnya arus informasi digital yang dikonsumsi anak setiap hari. Menurutnya, kelompok tertentu dengan strategi promosi agresif memanfaatkan celah literasi digital dan finansial, terutama pada anak-anak dan keluarga rentan. Kondisi tersebut menuntut kewaspadaan kolektif dari seluruh elemen masyarakat. Pemerintah memandang bahwa perlindungan anak dari bahaya judi daring tidak dapat dilakukan secara parsial atau sektoral. Salah satu fokus utama pemu-

lihan adalah mengembalikan konektivitas wilayah tengah Aceh yang terdampak cukup parah akibat banjir dan longsor. Jalur transportasi yang terputus selama bencana telah menghambat distribusi logistik, akses layanan dasar, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah memprioritaskan pembukaan kembali jalur-jalur strategis sebagai langkah awal rehabilitasi. Kebijakan ini mencerminkan pemahaman bahwa pemulihan infrastruktur bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan fondasi pemulihan kehidupan sosial ekonomi. Dengan akses yang kembali normal, masyarakat memiliki ruang untuk bangkit dan melanjutkan aktivitas secara bertahap.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menegaskan bahwa percepatan pemulihan dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurutnya, pemulihan tidak hanya menasar infrastruktur jalan dan jembatan, tetapi juga mencakup percepatan penyediaan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak. Pemerintah juga memperkuat perlindungan sosial agar masyarakat memiliki jaring pengaman sela-

ma masa transisi pemulihan. Pendekatan komprehensif ini menunjukkan bahwa kebijakan pemulihan dirancang untuk menjawab kebutuhan jangka pendek sekaligus jangka panjang. Kehadiran negara diwujudkan secara konkret melalui program yang terukur dan berkelanjutan.

Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menekankan bahwa pemulihan infrastruktur pascabanjir memiliki arti strategis bagi keberlangsungan perekonomian lokal. Ia menilai akses jalan merupakan kunci utama pergerakan barang, jasa, dan masyarakat, sehingga perbaikan titik-titik infrastruktur pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen penuh memperbaiki infrastruktur utama agar distribusi logistik dan bahan bakar kembali lancar. Dengan pasokan yang terjaga, aktivitas ekonomi masyarakat dapat pulih secara bertahap. Komitmen ini menjadi bukti bahwa pemulihan Aceh diarahkan untuk menjaga denyut ekonomi rakyat.

Sejumlah proyek prioritas pun dikebut untuk memastikan konektivitas antardaerah kembali berfungsi. Pemerintah memfokuskan perbaikan pada jembatan yang menghubungkan Bireuen dan Bener Meriah, serta ruas jalan Simpang KKA-Bener Meriah yang vital bagi mobilitas regional. Selain itu, upaya pemulihan juga dilakukan di koridor Pameu-Aceh Tengah, Nagan Raya-Aceh Tengah, dan Aceh Tengah-Gayo Lues. Jalur-jalur tersebut memiliki peran penting bagi masyarakat di dataran tinggi Aceh. Dengan terbukanya kembali akses ini, mobilitas antar-distrik diharapkan segera pulih dan aktivitas ekonomi kembali menggeliat.

Di tengah proses pemulihan yang terus berjalan, muncul pula tantangan berupa narasi provokatif yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial. Pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di beberapa titik dinilai sebagai upaya memanfaatkan situasi bencana untuk menyebarkan sentimen separatis. Ada juga beredarnya sebuah video di kanal media sosial Tik Tok oleh pemilik akun @uncle.mus7 yang menyerukan provokasi agar WNI di Malaysia mengumpulkan dana bagi pembelian senjata gerakan makar di Aceh. Video-video provokasi pendukung GAM yang muncul dan beredar di masyarakat Indonesia di Malaysia menunjukkan adanya oknum yang ingin memanfaatkan situasi bencana.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai tindakan tersebut sebagai bentuk provokasi yang menghasut emosi masyarakat. Ia menduga ada oknum yang menunggangi penderitaan warga untuk membangun kesan seolah pemerintah abai terhadap Aceh. Narasi semacam ini berisiko memelintir realitas di lapangan dan mengerdilkan peran negara.

Iwan juga menyoroti maraknya serangan narasi di media sosial yang mencoba memengaruhi persepsi publik terhadap penanganan bencana. Menurutnya, konten-konten tersebut kerap mengabaikan fakta mengenai kehadiran negara dan kerja keras aparat serta relawan di lapangan. Upaya tersebut, jika dibiarkan, dapat menciptakan ketidakpercayaan publik dan membuka ruang bagi pemberanaran ide separatisme. Oleh karena itu, ia memandang

respons pemerintah harus dilakukan secara tegas namun tetap persuasif. Ketegasan diperlukan untuk menjaga kedaulatan negara, sementara pendekatan persuasif penting agar masyarakat tidak kembali terjebak pada trauma konflik masa lalu.

Pemerintah dinilai telah mengambil langkah yang tepat dengan mengedepankan pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum dan dialog sosial. Penanganan provokasi dilakukan tanpa mengabaikan sensitivitas historis Aceh sebagai wilayah yang pernah mengalami konflik panjang. Dengan tetap memprioritaskan pemulihan bencana dan kesejahteraan rakyat, pemerintah menunjukkan bahwa stabilitas dan kemanusiaan berjalan beriringan. Pendekatan ini juga mempertegas bahwa negara hadir bukan hanya sebagai otoritas, tetapi sebagai pelindung masyarakat. Dalam konteks ini, pemulihan Aceh menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap negara.

Fokus pemerintah pada pemulihan Aceh pascabanjir mencerminkan komitmen menjaga keutuhan bangsa di tengah tantangan multidimensi. Bencana alam tidak boleh dijadikan celah untuk memecah belah persatuan atau melemahkan legitimasi negara. Sebaliknya, momentum ini seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat solidaritas nasional dan gotong royong. Keberhasilan pemulihan Aceh akan menjadi contoh bahwa negara mampu hadir secara cepat, adil, dan berpihak pada rakyat. Hal ini sekaligus menutup ruang bagi narasi-narasi yang mencoba merongrong persatuan. *) Penulis merupakan Kontributor Media Lokal.

TAJUK

Saatnya Mewujudkan Keadilan Sosial

PERTAGANTIAN tahun telah menempatkan 2025 di masa lalu. Dalam lembaran baru, 2026 membentangkan jalan masa depan bangsa yang penuh simpangan dan tantangan.

Tahun ini sudah semestinya kita mulai dengan refleksi. Menengok ke belakang, 2025 harus diakui merupakan tahun yang kurang memuaskan. Selama setahun terakhir, wajah pembangunan menyimpan gurat kelelahan.

Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 5,2% agaknya akan tercapai. Akan tetapi, angka itu nyatanya belum cukup mengangkat kesejahteraan rakyat secara merata. Upah minimum naik secara nominal. Namun, jika dipertandingkan dengan kebutuhan hidup layak, upah masih tetap babak belur.

Pertumbuhan ekonomi di angka 5% ke atas termasuk yang tertinggi di tingkat kawasan maupun global. Akan tetapi, dampaknya masih kurang terasa karena sering kali kue pertumbuhan hanya menjadi pesta bagi segelintir kelompok, baik korporasi besar maupun para elite.

Rakyat secara umum terpaksa masih gigit jari sambil berjuang menahan tekanan ekonomi. Di 2025, badai pemutusan hubungan kerja (PHK) menerjang dan menghantui sepanjang tahun. Berdasarkan catatan Kementerian Ketenagakerjaan, angka PHK pada Januari hingga November sebanyak 79.302 orang.

Namun, bila ditanyakan ke serikat-serikat pekerja, angkanya menembus 100 ribu orang. Salah satu penyebabnya, tidak semua pekerja yang terkena PHK terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Belum lagi ditambah angka pekerja di sektor informal yang masih mendominasi struktur ketenagakerjaan. Sebagian besar dari mereka bukan peserta penjaminan sosial tenaga kerja.

Dari situ dapat terlihat betapa banyak pekerja dalam posisi yang sangat rentan tanpa perlindungan sosial yang memadai. Ketika pemerintah menggelontorkan kebijakan subsidi upah, mereka yang paling rentan tersebut malah tidak kebagian karena tidak masuk sistem perlindungan oleh negara. Ketidakadilan mencuat.

Bung Hatta, Bapak Proklamator kita, pernah menekankan bahwa demokrasi bukan hanya soal kebebasan politik, melainkan juga keadilan sosial dan ekonomi.

Hal itu juga sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Penguasaan oleh negara sudah, tetapi penggunaan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat masih jauh panggang dari api.

Keadilan akses pelayanan publik pada 2025 juga masih menampakkan ketimpangan. Ombudsman RI mencatat ribuan keluhan atas infrastruktur, administrasi kependudukan, dan pelayanan kesehatan yang tidak merata.

Kekurangan itu makin terlihat jelas di daerah terpencil. Fasilitas kesehatan seperti puskesmas yang minim tenaga medis memperburuk ketimpangan antara kota dan desa.

Isu yang tak kalah mendesak ialah keadilan ekologis. Pembangunan nasional yang berorientasi pada investasi ekstraktif sering kali menumbalkan kelestarian alam.

Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menghantam separuh Sumatra dan merenggut lebih dari seribu jiwa adalah konsekuensi yang harus kita bayar. Namun, mestinya itu bisa kita cegah dengan menjaga keseimbangan pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan yang menopang kehidupan rakyat.

Awal 2026 harus menjadi momentum pembalikan arah kebijakan, dari yang bersifat elitis menjadi berpedoman pada harapan rakyat. Indikatornya ialah kenaikan kesejahteraan secara merata, bukan sekadar angka-angka statistik. Pemimpin dituntut berani menjunjung prinsip <i>salus populi suprema lex esto</i>, bahwa keselamatan atau kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Selamat Tahun Baru 2026. *Media Indonesia

Perpol dan Wajah Buruk Tradisi Legislasi Kita

PADA awal Desember lalu (9/12/2025), Kapolri telah mengesahkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol 10/2025). Kapolri mengklaim bahwa pengesahan Perpol 10/2025 tersebut berbasis pada kebutuhan dalam rangka menindaklanjuti dengan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 114/ PUU-XXIII/2025 (Sindonews, 19/12/2025).

OLEH : ADAM MUHSHI

Sebuah klaim yang tentu saja kontras dengan buruknya nilai yang diberikan publik terhadap Perpol 10/2025 tersebut. Penilaian buruk terhadap Perpol 10/2025 tak terlepas dari kecacatan yang tampak dalam proses pembentukannya yang terkesan terburu-buru pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 (Putusan MK 114/2025). Selain tentu saja, yang utama adalah buruknya substansi yang diusung di dalamnya sehingga makin memperkuat kesan ketergesaan dalam proses pembentukannya.

KEABSAHAN SEMU

Secara substansial, Putusan MK 114/2025 menggariskan bahwa anggota Polri aktif

tidak boleh menduduki jabatan sipil di kementerian atau lembaga lain di luar Institusi Polri yang tidak memiliki keterkaitan dengan tugas-tugas kepolisian. Ketentuan ini berlaku sejak Putusan MK 114/2025 tersebut dibaca.

Konsekuensinya, sebagaimana telah saya sampaikan sebelumnya kepada AntaraNews, yaitu bahwa sejak saat itu pula Kapolri tidak boleh memberikan penugasan kepada anggotanya untuk menempati jabatan-jabatan sipil di kementerian atau lembaga lain yang telah dilarang oleh Mahkamah Konstitusi.

Tentu saja, Kapolri juga seyogianya menarik seluruh anggotanya yang sedang menduduki jabatan sipil yang tidak diperbolehkan oleh

ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri) sebagaimana telah direvisi oleh Putusan MK 114/2025 (AntaraneWS, 19/12/2025). Ketentuan baru yang telah digariskan oleh Putusan MK 114/2025 tersebut telah ditarik oleh Perpol 10/2025.

Dalam hal ini, Perpol 10/2025 secara sepihak telah mengatur beberapa kementerian dan lembaga yang bisa ditempatkan oleh anggota Polri aktif. Artinya, bahwa secara substansial Perpol 10/2025 telah menerobos palang pintu yang telah dipasang oleh Mahkamah Konstitusi sehingga dapat dikatakan bahwa sejak semula ia memiliki cacat hukum bawaan berupa cacat substansi.

Dalam optik negara hukum, cacat substansi tersebut merupakan cacat yang bersentuhan langsung dengan jantung hukum. Dikatakan demikian, karena tujuan diberikannya kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan kepada lembaga-lembaga negara tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengusung dan menegakkan keadilan.

Dalam menjaga agar tujuan itu tak berbelok, maka Konstitusi telah menetapkan konstruksi ketatanegaraan sedemikian rupa yang secara berjenjang harus ditaati oleh

peraturan perundang-undangan di bawahnya. Pada titik inilah, dapat dikatakan bahwa keabsahan Perpol 10/2025 pada hakikatnya hanya bersifat semu.

Memang betul bahwa, Kapolri memiliki kewenangan pembentukan peraturan Polri sehingga secara formal Perpol 10/2025 harus dianggap sah sejak ia diundangkan. Akan tetapi, karena substansinya nyata-nyata menabrak perintah Putusan MK 114/2025 yang sudah berlaku dan mengikat sejak ia dibacakan, maka Perpol 10/2025 tersebut bisa diibaratkan sebagai sebuah wadah yang memasukkan substansi yang terlarang secara hukum.

Itu sebab, mengapa kemudian saya mengatakan bahwa peraturan yang demikian layak disebut sebagai sebuah peraturan yang hanya memiliki keabsahan semu semata.


Tradisi Buruk Legislasi Meskipun keabsahannya bersifat semu, namun keabsahan Perpol 10/2025 tersebut secara formal telah diamankan oleh asas praesumptio iustae causae. Berdasarkan asas ini, maka Perpol 10/2025 harus dianggap sah sampai ada tindakan pembatalan terhadapnya.

Keabsahan tersebut berlaku sejak ia diundangkan dan baru berakhir sejak ia dibatalkan oleh lembaga yang berwenang. Berdasarkan asas contrarius actus, pembatalan

Perpol 10/2025 dapat dilakukan oleh Kapolri sendiri sebagai pejabat yang memiliki kewenangan membentuknya. Tentu saja, Presiden sebagai atasan Kapolri juga memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan terhadap Perpol 10/2025 tersebut.

Selain itu, pembatalan dapat pula ditempuh melalui mekanisme permohonan judicial review kepada Mahkamah Agung. Dalam prakteknya, sangat jarang mekanisme pembatalan legislasi oleh pembentuknya sendiri digunakan. Buruknya substansi suatu peraturan perundang-undangan dan sekaligus mendapat penolakan keras dari masyarakat sangat jarang yang kemudian dicabut sendiri oleh pembentuknya.

Oleh sebab itu, Konstitusi memberikan kewenangan kontrol legislasi kepada lembaga yudisial yaitu berupa pranata judicial review. Kewenangan kontrol berupa pengujian undang-undang terhadap Konstitusi diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, sedangkan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diberikan kepada Mahkamah Agung. Penulis: Pengajar Hukum Ketatanegaraan, Dosen S2 Sains Hukum dan Pembangunan SPS Universitas Airlangga *Sindonews.Com

 PENERBIT: PT. Trimedia Sulteng Mandiri No. Rek. Bank Sulteng, An. PT. Trimedia Sulteng Mandiri Acc. 001010770011, Rek.BSI No. 728273443 a.n. PT. Trimedia Sulteng Mandiri Rek. Bank Mandiri, No. 151-00-1205223-6 An. PT. TRIMEDIA SULTENG MANDIRI PERWAKILAN JAKARTA: Jl. Tebet Timur IV F No. 6 Jakarta Selatan (Ahmad Avenus Toana, Sudarsono, Syafii, Agung Ramadhan) PERCETAKAN: TRIMEDIA GROUP (Isi di luar tanggung jawab percetakan)	WARTAWAN HARIAN SULTENG RAYA, DIBEKALI KARTU PERS/SURAT TUGAS DAN NAMANYA TERCANTUM DALAM BOX REDAKSI	PENDIRI/PIMPINAN UMUM: Tri Putra Toana. DEWAN MANAJEMEN TRIMEDIA : Tri Putra Toana, Temu Sutrisno, Mahmud Matangara. PIMPINAN PERUSAHAAN: Suyanto. PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB: Irwani.	
		REDAKTUR: Amiluddin, Andi Nurhidayat, Rahmat Kurniawan. STAF REDAKSI: Irwan, Andi Nurhidayat, Amiluddin, Amar Sakti, Andi Besse Rahmat Kurniawan, Helmy Jatmika. SEKRETARIS REDAKSI: Jane Lestari Parabak	
		LITBANG: A. Madukelleng, Fery, Hangga Nugracha. BIRO DONGGALA: Wahid Agus. BIRO SIGI: Feri Fadli. BIRO PARMOUT: Aslan Laeho. BIRO TOUNA: Budi. BIRO POSO: Syamsuyadi. BIRO BALUT: - BIRO MOROWALI: Intan. BIRO MOROWALI UTARA: Ivan Tagora. BIRO TOLITOLI: Rustam. BIRO BANGKEP: Pariaman Tambunan (Kepala Biro). BIRO BANGGAI: Pariaman T. E.	
		DESIGN & ARTISTIK: Azwar Anas (Manajer), Feryanto, Wiwis. PEMASARAN/SIRKULASI: Narwanro, Zainuddin L, Eko Margianto. KEUANGAN: Febrianti. EMAIL: sultengraya7h@gmail.com, sultengraya@gmail.com TARIF IKLAN: Warna (FC) Rp. 45.000/mmk. Hitam Putih (BW) Rp.30.000/mmk. ALAMAT REDAKSI: Jl. Rusa No. 36 TLP: 0451 4012 445 ALAMAT PERCETAKAN: Jl. Rusa No.36 Palu.	

OPTIMIS MENYAMBUT 2026

Dirut BRI Tegaskan Keyakinan pada Transformasi dan Strategi Pertumbuhan Jangka Panjang



ILUSTRASI

SULTENG RAYA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) meyakini kinerja perseroan akan semakin baik dalam beberapa tahun ke depan seiring berjalannya transformasi yang dilakukan.

Sejalan dengan optimisme tersebut, Direktur Utama BRI Hery Gunardi meminta kepada seluruh stakeholder, termasuk investor untuk melihat saham BBRI sebagai investasi jangka menengah (medium term) hingga panjang (long term).

“Sudah lebih dari delapan bulan lebih kita melakukan transformasi. Hasilnya sudah mulai ada dan tentunya pada tahun 2026-2027 itu akan lebih baik lagi dan harapannya BRI bisa take-off dan larinya akan lebih kencang dibandingkan dengan sebelumnya,” kata Hery dalam keterangan tertulis yang diterima Sulteng Raya, Kamis (1/1/2026).

Hery menekankan, perubahan menyeluruh tersebut membutuhkan waktu dan konsistensi

agar dapat berdampak signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Sebab, transformasi BRI menurutnya tidak hanya menyentuh aspek bisnis semata, tetapi juga mencakup berbagai enabler pendukung, mulai dari operasional, teknologi, permodalan, hingga penguatan merek.

“Memang yang paling penting itu adalah mindset, bagaimana budaya kerja yang kuat itu pasti akan berbanding lurus mendorong kinerja perusahaan,” ucap-

nya. Oleh karenanya, Hery menambahkan bahwa proses transformasi ini membutuhkan setidaknya waktu sekitar dua tahun untuk memberikan hasil yang optimal.

Sebelumnya pada Juli 2025 lalu BRI telah meluncurkan program transformasi yang dinamakan BRIVolution Reignite untuk membawa BRI memasuki fase pertumbuhan yang lebih efisien, lebih customer centric dan berkelanjutan.

Hery menjelaskan, transformasi tersebut akan berfokus pada sisi funding

(pendanaan), dengan memperbaiki struktur pendanaan dengan meningkatkan rasio dana murah sehingga dapat menekan cost of fund.

“Di sisi penyaluran kredit dan pinjaman, kami terus memperbaiki segmen mikro, konsumen, usaha kecil dan menengah, serta komersial. BRI juga bertransformasi pada sisi operasional yang berfokus pada pembenahan dan peningkatan kualitas layanan,” imbuhnya.

Selain itu, dari sisi sumber daya manusia, BRI terus memperbaiki kualitas data dan sistem, memperbarui

sistem manajemen talenta, serta menguatkan performa manajemen, termasuk dengan sistem reward (penghargaan).

Yang terbaru, pada Selasa (16/12) perseroan melakukan peluncuran Corporate Rebranding yang merupakan bagian integral dari agenda transformasi menyeluruh untuk memastikan relevansi dan daya saing jangka panjang di tengah perubahan lanskap industri keuangan.

“Melalui Corporate Rebranding, BRI menegaskan posisi sebagai bank univer-

sal yang tetap berakar kuat pada UMKM dan DNA ekonomi kerakyatan, sekaligus adaptif terhadap akselerasi digital, dinamika kebutuhan nasabah, dan tuntutan tata kelola berkelanjutan,” katanya.

“Rebranding ini tidak sekadar pembaruan identitas visual, tetapi mencerminkan perubahan cara berpikir, cara bekerja, serta cara BRI menghadirkan nilai bagi nasabah, investor, pelaku UMKM, dan perekonomian nasional secara lebih relevan dan inklusif,” pungkas Hery. **RHT**

Permintaan Turun, Harga CPO Melemah

SULTENG RAYA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut penurunan harga referensi (HR) komoditas minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) untuk periode Januari 2026 disebabkan oleh peningkatan produksi, terutama dari Malaysia, namun tidak diikuti peningkatan permintaan.

Dalam keterangan resmi Kemendag di Jakarta, Kamis (1/1/2026), HR CPO untuk penetapan bea keluar (BK) dan pungutan ekspor (PE), periode Januari 2026 adalah sebesar 915,64 dolar AS per metrik ton (MT).

Nilai ini turun sebesar 10,51 dolar AS atau 1,13 persen dari HR CPO periode

Desember 2025 yang tercatat sebesar 926,14 per MT.

“HR CPO Januari 2026 turun dibanding periode Desember 2025 karena ada peningkatan produksi, terutama dari Malaysia, yang tidak diikuti peningkatan permintaan dan penguatan mata uang ringgit terhadap dolar Amerika Serikat (AS),” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Tommy Andana.

Tommy menjelaskan sumber harga untuk penetapan HR CPO diperoleh dari rata-rata harga selama periode 20 November-19 Desember 2025 pada bursa



KOMODITAS sawit (ilustrasi). FOTO: ANTARA

CPO di Indonesia yang sebesar 853,13 dolar AS per MT, bursa CPO di Malaysia sebesar 978,14 dolar AS per MT, dan harga Port CPO Rotterdam sebesar 1.187,25 dolar AS per MT.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 35 Tahun 2025, bila terdapat perbedaan harga rata-rata pada tiga sumber harga sebesar lebih dari 40 dolar AS, maka perhitungan HR CPO menggunakan rata-rata dari dua sumber harga yang menjadi median dan sumber harga terdekat dari median.

“Dengan demikian, HR ditetapkan berdasarkan bursa CPO di Malaysia dan

bursa CPO di Indonesia. Berdasarkan perhitungan tersebut, HR CPO ditetapkan sebesar 915,64 dolar AS per MT,” kata Tommy.

Merujuk pada penetapan HR CPO 1-31 Januari 2026 tersebut dan berdasarkan Kolom Angka 6 Lampiran Huruf C Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2024 jo PMK Nomor 68 Tahun 2025, pemerintah mengenakan BK CPO sebesar 74 dolar AS per MT.

Sementara itu, merujuk pada Lampiran Huruf A PMK Nomor 69 Tahun 2025, PE CPO adalah 10 persen dari HR CPO periode 1-31 Januari 2026, yaitu 91,5637 dolar AS per MT. **ROL**

Uang Sitaan Rp 6,6 Triliun Bakal Dipakai Tambal Defisit APBN

SULTENG RAYA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan penggunaan uang sitaan dari Kejaksaan Agung senilai Rp 6,6 triliun.

Uang tersebut sudah masuk ke kas negara dan rencananya digunakan untuk menambal defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Ketika sudah masuk ke rekening, sudah tidak bisa dibedakan yang mana, yang mana,” ujar Purbaya saat konferensi pers di Kementerian Keuangan Rabu (31/12/2025).

Purbaya juga memberi sinyal uang sitaan itu tidak akan digunakan untuk membangun 100 hunian tetap (huntap) untuk korban terdampak bencana di Sumatera.

Sebab, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk membangun huntap itu dari hasil penyesiran anggaran kementerian/lembaga yang dianggap boros dan tidak produktif.

“Uangnya sudah ada itu dari penyesiran dana-dana apa anggaran APBN 2026 dari kementerian/lembaga yang kita sisir yang dianggap

dipakai untuk rapat dan jalan-jalan yang gak terlalu produktif. Sudah ada itu,” jelas Purbaya.

“Yang itu (uang sitaan) bisa dipakai untuk yang lain, tapi untuk saat ini ya itu (uang sitaan) mengurangi APBN kita, defisitnya,” tambah Purbaya.

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan uang senilai Rp 6.625.294.190.469,74 kepada negara melalui Purbaya. Uang itu merupakan akumulasi dari hasil rampasan negara dalam perkara tindak pidana korupsi dan penagihan denda administratif penyalahgunaan kawasan hutan.

Kegiatan itu digelar di gedung Jampidsus Kejaksaan, Jakarta Selatan, Rabu (24/12/2025). Penyerahan uang itu disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Pada hari yang baik ini pula, sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik, kami turut serahkan uang sebesar Rp 6.625.294.190.469,74,” kata Jaksa Agung di lokasi, dikutip dari detikNews. **IRC**



MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.FOTO: SHAFIRA CENDRA ARINI/DETIKCOM

Pemerintah Bakal Umumkan Swasembada Beras-Jagung

SULTENG RAYA - Pemerintah akan mengumumkan Indonesia telah berhasil swasembada pangan. Produk pangan yang akan diumumkan tak impor lagi adalah beras dan jagung.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan pengumuman akan dilaksanakan pemerintah, tapi tidak dalam waktu dekat karena sedang fokus pemulihan usai bencana banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Kalau nggak salah diundur tanggal berapa gitu. Nggak, nggak tanggal 31 (Desember 2025) ini sekarang kita lagi fokus Pak Presiden dan kita semua lagi fokus kedaruratan bencana ini. Jadi nggak ada pengumuman di 31 malam,” kata dia ditemui di Kantor HKTI Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Sudaryono mengatakan pencatatan produksi untuk komoditas beras dan jagung terus dilakukan hingga 31 Desember 2025 dan awal Januari 2026. Jika tidak ada impor sama sekali pada dua komoditas itu, maka Indonesia resmi swasembada pangan pada 2025.

Meski demikian, ia menegaskan kembali pengumuman itu masih dipertimbangkan karena pemerintah tengah fokus memulihkan beberapa tempat tengah

menghadapi pasca bencana alam.

“Tapi bahwa pengumumannya itu lagi kita pertimbangkan, karena lagi kedaruratan. Tapi secara pencatatan kita lakukan. (Pengumuman swasembada) Iya beras sama jagung,” ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan akan mengumumkan status swasembada pangan 1 Januari 2026. Amran mengatakan status swasembada pangan tak lepas dari perbaikan produksi.

Produksi beras misalnya yang diproyeksi meningkat 4,17 juta ton menjadi 34,79 juta ton pada periode Januari-Desember 2025.

“Produksi beras dari target Bapak Presiden awalnya 4 tahun, kemudian 3 tahun, terakhir 1 tahun, meningkat 4,17 juta ton. Ini dari BPS. Insyaallah, 2 minggu kemudian kita bisa umumkan Indonesia swasembada pangan dan tercepat mencapai swasembada pangan di tanggal 1 Januari,” kata Amran dalam Sidang Kabinet Paripurna, disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/12/2025).

Menurut Amran Indonesia juga berhasil mengamankan stok beras tertinggi pada tahun ini yang mencapai 3,7 juta ton. **IRC**



SBY Bakal Tempuh Langkah Hukum Usai Difitnah Terlibat Ijazah Jokowi



PRESIDEN
ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
FOTO: CNN INDONESIA/FARID

SULTENG RAYA - Politikus Partai Demokrat Andi Arief menyebut Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mempertimbangkan mengambil langkah hukum atas isu yang menyeretnya dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Ia menyebut SBY juga cukup terganggu dengan tuduhan yang menarasikan seolah-olah SBY ada di belakang isu itu.

“Kalau juga tidak dihentikan, ada kemungkinan Pak

SBY akan mengambil langkah hukum, dengan pertama memberikan somasi kepada orang-orang yang sudah membuat fitnah tersebut,” kata Andi Arief dalam video yang diunggah di akun Facebook-nya, dikutip Rabu (31/12).

Andi Arief mengatakan isu itu belakangan kian berkembang liar di media sosial.

Ia menyebut fitnah yang dilayangkan ke SBY pada isu itu belakangan sangat masif.

Ia pun membantah keterlibatan SBY dalam kasus dugaan ijazah palsu tersebut.

Andi Arief menyebut hu-

bugan SBY dan Jokowi juga berjalan baik.

“Kita berharap untuk dihentikan lah fitnah yang sudah tidak karuan di TikTok,” ucapnya.

Belakangan Jokowi tengah diliputi oleh kasus dugaan ijazah palsu saat ia berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM.

Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya telah menetapkan delapan tersangka yang terbagi dalam dua klaster terkait kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi.

Klaster pertama terdiri dari lima tersangka yakni Eggi Sudjana, Kurnia Tri

Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi dan Muhammad Rizal Fadillah.

Kemudian klaster kedua terdiri dari tiga tersangka yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar dan Tifauziah Tyassuma alias dr Tifa.

Belakangan di media sosial beredar isu yang menarasikan SBY menjadi dalang di balik isu ini.

Narasi itu berdalih dengan mengaitkan Roy Suryo yang merupakan eks politisi Partai Demokrat sekaligus mantan Menpora saat SBY menjabat sebagai Presiden RI. [CNN](#)

GUBERNUR dari halaman1

pengangkatan.

Ia berharap seluruh ASN dapat terus mengabdikan dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah.

Dalam arahannya, Gubernur menekankan bahwa loyalitas merupakan modal utama dalam membangun birokrasi yang solid dan berdaya guna. Loyalitas kepada negara dan pimpinan dinilai menjadi fondasi penting agar roda pemerintahan dapat berjalan secara efektif.

“Tanpa loyalitas, kita tidak mungkin bekerja bersama, tidak mungkin beresatu, dan tidak mungkin mencapai cita-cita bersama. Jabatan ini adalah amanah dari Tuhan dan kepercayaan pimpinan yang harus dijaga sebaik-baiknya,” tegasnya.

Selain loyalitas, profesionalisme ASN juga menjadi perhatian utama. Gubernur mengingatkan agar seluruh

yang antre ingin menjadi PPPK,” ujarnya.

Menariknya, Gubernur juga menyampaikan bahwa ke depan, ASN dan PPPK tidak hanya dinilai oleh pimpinan, tetapi juga memiliki ruang untuk memberikan penilaian terhadap kinerja pimpinan mereka.

“Penilaian pejabat tidak hanya dari atas, tetapi juga dari bawah. Kalau ada pimpinan yang tidak bekerja dan tidak bertanggung jawab, sampaikan,” kata Gubernur.

Kepada para pejabat eselon II yang dilantik, Gubernur menegaskan pentingnya kerja cepat dan nyata sejak hari pertama.

Ia meminta agar pejabat yang baru dilantik langsung masuk bekerja tanpa menunggu serah terima jabatan atau seremoni lepas sambut yang dinilai hanya menghabiskan waktu dan anggaran.

Prabowo Kembali Jelaskan Bencana Sumatra Tak Disebut Bencana Nasional



PRESIDEN
Prabowo Subianto kembali menjelaskan alasan bencana Sumatra tidak disebut sebagai bencana nasional. FOTO: TANGKAPAN LAYAR YOUTUBE SEKRETARIAT PRESIDEN

SULTENG RAYA - Presiden RI Prabowo Subianto menjelaskan kembali alasan bencana banjir dan longsor di tiga provinsi di Sumatra tak disebut sebagai bencana nasional.

Prabowo menyadari hingga kini masih ada pihak yang mendesak bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat ditetapkan sebagai bencana nasional. Prabowo pun menjelaskan alasannya.

“Jadi saudara-saudara masih ada yang mempersoalkan kenapa tidak bencana nasional, ya masalahnya adalah kita punya 38 provinsi, masalah ini berdampak di tiga provinsi, masih ada 35 provinsi lain.”

Meski tak ditetapkan bencana nasional, Prabowo menekankan pemerintah serius menangani apa yang terjadi di Sumatra. Dia lantas memberi contoh salah

satunya kunjungan para menteri ke daerah terdampak bencana.

“Nyatanya dari seluruh kabinet hari ini ada berapa menteri di sini ya kan, dua sedang di Aceh Utara, 10 menteri sedang di Aceh sekarang, ada berapa menteri lagi yang sedang di tempat lain coba, dan juga kita masih hadapi beberapa lagi kabupaten di beberapa provinsi lain yang juga ada masalah,” ujar Prabowo.

“Jadi saudara-saudara, kita memandang sangat serius dan kita akan habis-habisan untuk membantu ya kita sudah siapkan anggaran cukup besar untuk mengatasi ini,” ucap Prabowo.

Dalam kunjungan ke Aceh Tamiang, Prabowo juga mengatakan pemerintah terbuka menerima bantuan dengan catatan pemberi bantuan mematuhi

mekanismenya.

“Kita kerahkan semua upaya kita. Jangan salah, kalau saya mengatakan kita belum mau nyatakan bencana nasional, tidak berarti kita akan tanggung-tanggung dalam upaya kita, kita tidak tanggung-tanggung. Dan juga tolong jangan diartikan kita sombong tidak mau menerima bantuan. Silakan, yang katakan, inikan masalah kemanusiaan, kalau siapapun yang mau bantu, masak kita tolak.”

“Kita tidak memberi isyarat bahwa kita tidak mampu, tapi kita juga manusia, kalau ada yang mau bantu, kita terima dengan baik, tapi kita salurkan langsung. Kalau mau bantu ke Aceh, silakan, kalau ada yang mau bantu Sumbang, mau bantu ke Sumut silakan. Nanti kita fasilitasi,” kata Prabowo menambahkan. [CNN](#)

JEJAK dari halaman1

Penundaan ini bukan tanpa sebab. Sejumlah sumber menyebutkan, pembahasan Pokir menjadi salah satu titik krusial yang memicu kebuntuan sementara antara legislatif dan eksekutif.

Pada tahap awal pembahasan, pemerintah daerah hanya menyetujui alokasi Pokir DPRD sebesar Rp10 miliar. Angka ini diklaim telah melalui asesmen kemampuan keuangan daerah dan disesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran.

Namun, dinamika berubah ketika pembahasan memasuki fase lanjutan. Di ruang-ruang rapat yang tertutup dari akses publik, terjadi negosiasi intens antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dari sinilah, isu mengenai tambahan anggaran mulai mengemuka.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sumber internal pembahasan, pemerintah daerah kemudian menyetujui tambahan Rp10 miliar, sehingga alokasi Pokir meningkat menjadi Rp20 miliar. Keputusan ini disebut tidak lepas dari tekanan politik dalam pembahasan APBD.

Belum selesai pada ang-

ka tersebut, beredar kembali kabar bahwa DPRD mengajukan tambahan Rp5 miliar.

Jika benar, maka total Pokir DPRD dalam APBD 2026 mencapai Rp25 miliar. Meski belum pernah diumumkan secara resmi di forum terbuka, isu ini menjadi perbincangan hangat di lingkungan gedung DPRD.

Indikasi kuat adanya tarik ulur anggaran terlihat pada sidang paripurna DPRD Parigi Moutong, Selasa malam, 23 Desember 2025 lalu. Sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sayutin Budianto tersebut sempat tertunda hampir dua jam.

Pantauan di ruang sidang menunjukkan sejumlah anggota Banggar DPRD mendatangi TAPD di sela-sela penundaan.

Beberapa diskusi berlangsung tertutup dan di luar agenda resmi paripurna. Situasi ini memunculkan dugaan kuat adanya lobi-lobi intens terkait komposisi anggaran, terutama Pokir DPRD.

Agenda asistensi dan evaluasi Ranperda APBD 2026 yang semula direncanakan malam itu akhirnya ditunda, memperkuat dugaan bahwa belum tercapainya kesepakatan final menjadi

penyebab utama.

Sidang paripurna baru kembali dilanjutkan sekitar pukul 23.00 WITA. Dalam forum tersebut, laporan hasil kerja Banggar DPRD terhadap Ranperda APBD 2026 disampaikan oleh Leli Pariani.

Dalam laporan itu disebutkan total alokasi anggaran Rancangan APBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp1,7 triliun. Namun, rincian detail mengenai porsi Pokir DPRD tidak dipaparkan secara eksplisit di forum terbuka, sehingga menimbulkan ruang spekulasi di tengah publik.

Di tengah beredarnya isu tersebut, Ketua DPRD Parigi Moutong Alfred Tonggihroh memberikan bantuan tegah. Ia menyatakan tidak pernah ada permintaan tambahan Pokir di luar kesepakatan awal.

“Dari asesmen kemampuan keuangan daerah, yang bisa masuk program itu hanya Rp10 miliar,” kata Alfred saat dihubungi, Rabu (31/12/2025).

Ia juga membantah keras kabar adanya tambahan Rp10 miliar maupun Rp5 miliar.

“Tidak ada. Permintaan tambahan Rp10 miliar lalu

Rp5 miliar lagi itu tidak benar,” tegasnya.

Menurut Alfred, pembahasan APBD 2026 telah disetujui bersama pada 23 Desember 2025 dan kini berada di tangan eksekutif untuk proses asistensi ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Meski bantahan telah disampaikan, polemik Pokir DPRD Parigi Moutong menyalisakan pertanyaan mendasar, di mana publik dapat mengakses secara transparan rincian final Pokir DPRD dalam APBD 2026?

Tanpa keterbukaan dokumen anggaran secara detail, ruang abu-abu dalam pembahasan APBD berpotensi terus memunculkan spekulasi.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, transparansi bukan sekadar formalitas, melainkan prasyarat utama menjaga kepercayaan publik.

APBD 2026 Parigi Moutong kini menunggu proses asistensi dan evaluasi di tingkat provinsi. Hasil akhir proses tersebut akan menjadi jawaban apakah polemik Pokir DPRD berhenti sebagai isu, atau justru membuka bab baru dalam dinamika politik anggaran daerah. [AJI](#)

sementara, kunjungan para menteri ke daerah terdampak bencana.

“Nyatanya dari seluruh kabinet hari ini ada berapa menteri di sini ya kan, dua sedang di Aceh Utara, 10 menteri sedang di Aceh sekarang, ada berapa menteri lagi yang sedang di tempat lain coba, dan juga kita masih hadapi beberapa lagi kabupaten di beberapa provinsi lain yang juga ada masalah,” ujar Prabowo.

“Jadi saudara-saudara, kita memandang sangat serius dan kita akan habis-habisan untuk membantu ya kita sudah siapkan anggaran cukup besar untuk mengatasi ini,” ucap Prabowo.

Dalam kunjungan ke Aceh Tamiang, Prabowo juga mengatakan pemerintah terbuka menerima bantuan dengan catatan pemberi bantuan mematuhi

MENBUD dari halaman1

“Harapannya ini menjadi gerbang informasi bagi kawasan megallitik Lore Lindu dan disini juga merupakan tempat situs Watunonju yaitu lumpang-lumpang,

daerah untuk mendukung serta memajukan kebudayaan Nasional di Indonesia khususnya Sulawesi Tengah.

“Lore Lindu ini kawasan cagar budaya yang luar

biasa dan merupakan cagar budaya dunia yang usianya sudah ribuan tahun maka ini harus diungkap dan dipromosikan ke dunia,” ujarnya. [ANT](#)

mengingat saudara-saudara kita yang ada di Sumatra dan Aceh masih berusaha untuk bangkit dari bencana yang menimpa mereka, mari kita bersama-sama untuk prihatin dengan keadaan mereka seperti yang pernah kita alami waktu tahun 2018 yang lalu,” imbaunya.

“Untuk itu saya mengimbau sekali lagi, silahkan kita sambut tahun 2026 ini dalam suasana tidak seperti biasa euforia yang berlebihan, apalagi kalau bisa dikurangi agar tidak menggunakan petasan, kembang api dan sebagainya, tetap jaga ketertiban kita dari hal-hal yang bisa menimbulkan gesekan di tengah-tengah

masyarakat,” tambahnya.

Sementara, Kapolda Sulteng, Irjen Pol Dr. Endi Sutendi berharap, menjelang tahun baru 2026 kita harapkan kondusif dan kita minta kepada seluruh masyarakat ikut berpartisipasi untuk menjaga kamtibmas.

“Baru saja kita lakukan peninjauan di sejumlah pos untuk melihat kesiapan personel gabungan, baik itu dari Polri, TNI dan instansi terkait lainnya yang mana ini semua berkolaborasi untuk menjaga kamtibmas di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu ini untuk tetap kondusif,” harapnya. [XAT](#)

TEMUKAN dari halaman1

pasir besar (Anarhynchus leschenaultii), cerek tilil (Anarhynchus alexandrinus), gajahan pengala (Numenius phaeopus), dan trinil ekor kerbau (Heteroscelus brevipes).

Dia menjelaskan kehadiran burung tersebut didukung oleh keterkaitan antarhabitat, di mana muara sungai, pantai berlumpur, pantai berpasir, serta lahan basah saling melengkapi dan membentuk satu kesatuan ekosistem utuh dalam menyediakan pakan, tempat beristirahat, serta ruang aman bagi burung-burung tersebut.

Oleh karena itu, kata dia, kerusakan atau degradasi pada salah satu tipe habitat khususnya di muara sungai berpotensi menimbulkan dampak langsung terhadap

keberlangsungan rantai migrasi burung air dan burung pantai, sekaligus menurunkan fungsi ekologis Teluk Palu secara keseluruhan.

Dia menyebutkan, menurut geoportel ESDM Desember 2025, sebaran izin pertambangan batuan di Teluk Palu mencapai 109 yang terbagi 56 berstatus operasi produksi, 2 eksplorasi, dan 51 wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) yang sifatnya pencadangan.

“Reklamasi pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) atau Jetty pertambangan batuan pada mayoritas muara sungai di Teluk Palu tentu memberi pengaruh langsung pada hilangnya jalur transit burung migrasi,” katanya.

Ia menjelaskan, dari peta sebaran izin usaha pertam-

bang, saat ini hanya ter-sisa muara Sungai Taipa dan Sungai Tawaili belum beralih fungsi menjadi TUKS atau Jetty, sehingga penting untuk membebaskan muara tersebut dari aktivitas penambangan dengan menetapkan zona di Teluk Palu dengan mengintegraikannya ke dalam tata ruang Kota Palu maupun tata ruang Provinsi Sulawesi Tengah.

Menurut dia, Teluk Palu merupakan teluk relatif semitertutup dan mendapatkan pasokan air dari berbagai aliran sungai, sehingga di teluk ini membentuk zona peralihan muara pesisir kaya akan nutrisi, lumpur/pasir, dan merupakan lokasi produktif.

“Secara ekologis, Teluk Palu menjadi penting karena

menyediakan kebutuhan burung air dan burung pantai berupa perairan dangkal sebagai tempat untuk mencari makan, serta vegetasi mangrove dan semak pesisir, digunakan sebagai tempat untuk berlindung dan beristirahat,” katanya.

Ia mengatakan, fungsi tersebut membuat kawasan muara termasuk muara Taipa dapat berperan menjadi lokasi singgah yang dapat membantu burung migran untuk memulihkan energi sebelum melanjutkan perjalanan jauh.

Dalam tingkat kawasan, kata dia, Indonesia berada dalam lintasan jalur migrasi burung air Asia-Australria, dan jejaring lahan basah di sepanjang jalur ini diakui sebagai penopang konektivitas migrasi. [ANT](#)

sekaligus penegakan perang terhadap narkoba di wilayah hukum Polres Parigi Moutong.

“Kami berkomitmen bersama seluruh polsek jajaran untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta obat-obatan terlarang lainnya di wilayah hukum Polres Parigi Moutong. Kami berharap upaya penegakan hukum ini mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat demi mewujudkan Parigi Moutong yang aman, sehat, dan bebas dari narkoba,” ujarnya.

Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Parigi Moutong, IPTU Nicho Eliezer, S.Tr.K menjelaskan, dari 67 kasus narkoba yang

ditangani, 44 perkara telah dinyatakan lengkap (P21) dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Parigi Moutong.

Sementara 13 perkara masih berada pada tahap I, serta 9 perkara masih dalam proses penyidikan. Adapun penyelesaian perkara melalui mekanisme diversi maupun SP3 hingga saat ini nihil. Namun demikian, satu kasus narkoba pada tahun 2025 diselesaikan melalui restorative justice.

“Satu kasus diselesaikan melalui restorative justice berupa rehabilitasi jalan di BNN Poso. Hal ini Sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dimana disebutkan bahwa kasus narkoba dibawah

satu gram wajib direhabilitasi,” jelas Nicho.

Nicho juga menjelaskan, dalam pengungkapan kasus-kasus tersebut, aparat kepolisian berhasil mengamankan 79 orang tersangka, terdiri dari 73 laki-laki dan 6 perempuan. Selain itu, barang bukti narkoba jenis sabu yang disita mencapai 725 paket dengan total berat 506,73 gram.

Dengan jumlah barang bukti tersebut, Polres Parigi Moutong diperkirakan telah berhasil menyelamatkan sekitar 30 ribu jiwa dari ancaman bahaya narkoba, yang tidak hanya merusak kesehatan, tetapi juga mengancam masa depan generasi muda dan ketahanan sosial masyarakat. [AJI](#)

Kapolda Sulteng nyatakan Operasi Madago Raya resmi berakhir



KAPOLDA SULTENG Irjen Pol. Endi Sutendi. FOTO: ANTARA/HO-HUMAS POLDA SULTENG

SULTENG RAYA - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Tengah (Sulteng) Irjen Pol. Endi Sutendi menyatakan Operasi Madago Raya di Provinsi Sulawesi Tengah resmi berakhir per 31 Desember 2025.

“Berakhirnya Operasi Madago Raya merupakan bagian dari evaluasi strategis Polri dalam penanganan keamanan di wilayah Sulawesi Tengah,” kata Irjen Pol. Endi Sutendi di Palu, Kamis.

Ia menjelaskan meskipun operasi khusus itu dihentikan, namun langkah-langkah pengamanan dan pemeliharaan stabilitas tetap menjadi prioritas utama kepolisian.

Operasi Madago Raya merupakan kelanjutan dari Operasi Tinombala yang berganti nama sejak 1 Januari 2021, sekaligus menandai perubahan pendekatan Polri yang lebih mengedepankan upaya pencegahan, pembinaan, serta pelibatan masyarakat

dalam menjaga keamanan.

Endi menegaskan bahwa berakhirnya Operasi Madago Raya tidak berarti aktivitas patroli dan pengamanan di wilayah operasi juga berhenti.

Menurut dia, kegiatan kepolisian tetap berjalan melalui Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) di seluruh Polres jajaran dengan dukungan penuh dari Polda Sulawesi Tengah.

Ia juga memastikan wilayah bekas Operasi Madago Raya tetap menjadi atensi utama kepolisian. Namun, kata dia, pola pengamanan yang diterapkan akan mengalami penyesuaian seiring dengan situasi dan kondisi keamanan yang semakin kondusif.

“Poso tetap menjadi atensi dengan melakukan KRYD, dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif hingga penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran ataupun tindak pidana

terorisme,” ujarnya.

Ia mengatakan kegiatan berkelanjutan berupa pembinaan dan pengawasan tetap dilaksanakan demi menjaga stabilitas keamanan khususnya di Kabupaten Poso, Parigi Moutong, Tojo Una-Una, serta wilayah Sulawesi Tengah secara umum.

Ia berharap seluruh elemen masyarakat turut berperan aktif menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif.

Ia juga menambahkan bahwa upaya deradikalisasi sepanjang 2025 berjalan efektif, di mana sekitar seratusan eks narapidana terorisme (napiter) dan simpatisan dilaporkan telah kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Keamanan tidak bisa hanya diserahkan kepada Polri semata. Peran aktif masyarakat sangat penting agar situasi Sulawesi Tengah tetap aman, damai, dan kondusif,” katanya.

Hardianto Bagikan Paket Tahun Baru

SULTENG RAYA- Wali Kota Palu, Hadian-to Rasyid, bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Palu melakukan kunjungan dan peninjauan ke sejumlah Pos Pengamanan dan Pos Terpadu Operasi Lilin Tinombala 2025, pada Rabu (31/12/2025).

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memastikan kesiapan personel serta kelancaran pelaksanaan pengamanan menjelang perayaan Tahun Baru 2026.

Adapun pos yang dikunjungi meliputi Pos Terpadu Pantoloan, Pos Yan Simpang 4 Kelurahan Mamboro, Pos Pam Jalan R.E. Martadinata, Pos Yan Jalan Sudirman, Pos Yan PGM, Pos Pam Maesa, Pos Pam Simpang 4 Jalan Towua, serta Pos Terpadu Bandara Mutiara SIS Al-Jufri.

Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota Palu berinteraksi langsung dengan petugas gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, tenaga kesehatan, serta instansi terkait lainnya.

Wali kota juga menerima laporan terkait situasi keamanan, arus lalu lintas, serta kesiapan pelayanan kepada masyarakat.

Wali Kota Palu, Hadian-to Rasyid, menyampaikan bahwa berdasarkan laporan dari seluruh pos, kondisi arus mudik dan mobilitas

masyarakat berjalan dengan baik dan lancar.

“Alhamdulillah, informasi dari pos menyampaikan bahwa arus mudik cukup baik. Sekarang kita memasuki fase arus kembali, dan alhamdulillah teman-teman di semua pos betul-betul mengawal pos dengan baik serta melaksanakan tugas dengan maksimal, sehingga pos-pos ini benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat,” ungkap wali kota.

Menjelang malam pergantian tahun, wali kota juga mengimbau masyarakat agar tetap menjaga kondusivitas, keamanan, dan kenyamanan Kota Palu.

“Insya Allah malam ini adalah malam pergantian tahun. Kita berharap masyarakat dapat menjaga situasi kota agar tetap aman dan kondusif. Perayaan pergantian tahun silakan dilakukan sebagaimana lazimnya, namun tetap

dalam ruang-ruang yang baik dan memperhatikan keselamatan serta ketertiban,” tambah wali kota.

Wali kota juga menegaskan bahwa keberadaan pos pengamanan dan pelayanan tidak hanya untuk memantau arus kendaraan, tetapi juga sebagai pusat pelayanan dan pengaduan masyarakat.

“Pos ini bukan hanya untuk memantau kendaraan. Kami mengajak masyarakat agar tidak ragu melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban yang menjadi perhatian kita bersama,” tutup wali kota.

Melalui Operasi Lilin Tinombala 2025 ini, Pemerintah Kota Palu bersama Forkopimda berharap perayaan Natal dan Tahun Baru dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. **ans**



PENYERAHAN paket makanan ke setiap posko pengamanan Pos Terpadu Operasi Lilin Tinombala 2025, Rabu (31/12/2025). FOTO PPID KOMINFO PALU



Moh Amin Parakkasi, S.Ag., M.Hi
Ketua BPH



Prof. Dr. H. Rajindra Rum, SE., MM
Rektor



Dr. Sudirman, S.KM.M. Kes
Wakil Rektor I





Dr. Burhanuddin SE., M. M
Wakil Rektor II



Dr. Budiman, S.Pd., M.Kes
Warek III



Dr. Moh Yusuf Hasmin, S.H., M.H
Warek IV

Rektor Unismuh Palu Ajak Civitas Akademika Tingkatkan Kinerja di Tahun 2026

SULTENG RAYA — Rektor Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM., mengajak seluruh civitas akademika Unismuh Palu untuk menyambut dan memasuki tahun baru 2026 dengan meningkatkan kinerja di semua lini.

Ajakan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat komitmen institusi dalam mencapai target, yakni meraih akreditasi Unggul pada tahun 2027.

Prof. Rajindra menegaskan, target akreditasi Unggul merupakan amanah besar yang harus dijawab dengan kerja nyata, disiplin, serta konsistensi dalam meningkatkan mutu akademik dan tata kelola perguruan tinggi. Menurutnya, pencapaian tersebut tidak dapat diraih secara instan, melainkan melalui proses panjang yang membutuhkan keseriusan dan keterlibatan seluruh unsur di lingkungan kampus.

“Target ini membutuhkan kerja bersama dan kolaborasi semua pihak. Bukan hanya rektorat, tetapi juga mahasiswa, program studi, hingga fakultas. Itu butuh kerja kolaborasi semua,” ujar Prof. Rajindra, Kamis



Rajindra

(1/1/2026).

Ia menjelaskan, peran mahasiswa juga sangat penting dalam mendukung pencapaian akreditasi Unggul, khususnya melalui peningkatan prestasi akademik dan nonakademik, kepatuhan terhadap budaya akademik, serta keterlibatan aktif dalam kegiatan kemahasiswaan yang produktif dan berdaya saing.

Di sisi lain, program studi dan fakultas didorong untuk terus memperkuat mutu pembelajaran, kurikulum berbasis capaian pembelajaran, serta kualitas dosen dan tenaga kependidikan.

Lebih lanjut, Prof. Rajindra menilai Unismuh Palu memiliki potensi

besar untuk mencapai target tersebut.

Hal ini tercermin dari capaian sejumlah program studi yang saat ini telah berhasil meraih status akreditasi Unggul dari lembaga akreditasi nasional. Capaian tersebut, kata dia, menjadi bukti bahwa budaya mutu di lingkungan Unismuh Palu terus tumbuh dan berkembang.

“Kita punya modal dan potensi. Saat ini saja sudah ada beberapa program studi yang memperoleh akreditasi Unggul. Jika kita bisa bersungguh-sungguh dan menjaga konsistensi

kinerja, insyaallah target itu bisa dicapai,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan tridarma perguruan tinggi, meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, sebagai elemen utama dalam penilaian akreditasi. Selain itu, tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan juga menjadi aspek yang harus terus diperbaiki.

Menurut Prof.

Rajindra, momentum pergantian tahun hendaknya dimaknai sebagai titik refleksi atas capaian yang telah diraih, sekaligus menjadi pijakan untuk menyusun langkah-langkah strategis ke depan. Tahun 2026 diharapkan menjadi tahun konsolidasi dan penguatan fondasi menuju Unismuh

Palu yang unggul, adaptif, dan berdaya saing di tingkat nasional.

“Memasuki tahun 2026, mari kita jadikan sebagai tahun kerja nyata, tahun peningkatan kualitas, dan tahun penguatan komitmen bersama untuk membawa Unismuh Palu meraih akreditasi Unggul pada 2027,” tutupnya. **eng**

